



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamsno, Yogyakarta 55152
Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: kip-diy@jogjaprovo.go.id, Website: komisi-informasi.jogjaprovo.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi perubahan paradigma ke arah keterbukaan. Bagi lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, penyelenggara negara maupun lembaga/organisasi yang mengelola bantuan luar negeri maupun dana masyarakat, harus memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, juga mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23: *“Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”*.

Pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi kepada badan publik dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan ke badan publik kemudian diumumkan ke publik.

2. Dasar Kegiatan, Maksud dan Tujuan

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik di DIY didasarkan pada Pasal 23 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 37 ayat (1) dan (2)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik.

Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mengetahui teerpwenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik. Sedangkan tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara.

3. Proses dan Mekanisme

Tahun ini adalah Tahun kelima Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) , Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Sejak dari penyusunan instrumen penilaian, penyusunan daftar kuesuioner hingga penentuan pemenang. Ketiga institusi ini kami ajak dalam rangka merumuskan instrumen penilaian sehingga secara metodologis, monitoring dan evaluasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tim Monev menyepakati beberapa ketentuan pokok antara lain bahwa kategori yang dimonev terdiri dari :

- a. PPID Utama Se-DIY
- b. OPD Pemerintah Daerah DIY
- c. Instansi Vertikal Se-DIY
- d. Lembaga Yudikatif Se-DIY
- e. Lembaga Legislatif Se-DIY
- f. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY
- g. Kecamatan Se-DIY
- h. BUMD Se-DIY

- i. Apresiasi Komitmen Terbentuknya PPID Desa
- j. Apresiasi Inovasi dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahun ini Tim menyepakati bahwa bobot nilai kuesioner sebesar 10 persen, Website 35 persen, Uji Akses 15 persen, Visitasi 20 persen dan Presentasi 20 persen. Besarnya bobot nilai website karena informasi yang diunggah melalui mekanisme yang bertahap, serta dapat diakses dari seluruh dunia, Perubahan bobot nilai pada presentasi dibandingkan dengan tahun lalu juga dikarenakan presentasi sebagai tahapan terakhir tahapan monitoring dan evaluasi. Disamping untuk menentukan terbaik satu, dua dan tiga juga sebagai tolak ukur nilai Implementasi keterbukaan Informasi di Badan Publik yang masuk peringkat tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang presisi sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi Daerah DIY melakukan 5 (lima) tahapan penilaian:

Tahap Pertama memiliki bobot 10%, Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh KID DIY ataupun yang diunduh melalui *website* KID DIY, Selanjutnya seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Monev. Tahapan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 – 15 Mei 2019.

Tahap Kedua memiliki bobot 35%, Verifikasi *Website* atau pencermatan *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*). Tahapan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 – 28 Juni 2019.

Tahap Ketiga memiliki bobot 15%, Uji Akses yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dan Universitas Gajah Mada (UGM) ke sejumlah Badan Publik yang masuk nominasi Uji Akses berdasarkan hasil nilai tahap kesatu dan kedua. Tahapan dilakukan pada tanggal 04 Juli 2019 – 27 Juli 2019.

Tahap Keempat memiliki bobot 20%, Visitasi ke sejumlah Badan Publik yang masuk dalam nominasi berdasarkan penilaian tahap pertama, tahap kedua dan

tahap ketiga. Visitasi dilakukan dengan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan tertulis dalam SAQ dan dikonversikan dengan nilai sesuai pandangan Tim Monitoring dan Evaluasi badan publik Tahun 2019. Tahapan dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019.

Tahap Kelima memiliki bobot 20%, Presentasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Badan Publik yang masuk nominasi tahapan kesatu sampai keempat dihadapan Tim Monev KID DIY Tahun 2019 untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pimpinan Badan Publik terhadap pelayanan informasi di Badan Publik. Tahapan dilakukan pada tanggal 19 September 2019.

Dari tahapan pertama dan kedua maka dapat diketahui jumlah nilai yang diperoleh. Dari Badan Publik yang memperoleh nilai tinggi, kami ambil sebanyak 3 kali dari masing-masing kategori, untuk dilakukan Uji Akses. Kemudian dari nilai Uji Akses yang diperoleh kemudian diambil sebanyak 2 kali dari masing-masing kategori untuk masuk tahapan visitasi. Tahapan Presentasi dilakukan terakhir untuk menentukan Badan Publik terbaik kesatu, kedua dan ketiga masing-masing kategori kecuali kategori OPD Kabupaten/Kota menentukan Terbaik kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Kelima tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mencermati sejauh mana informasi publik dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

4. Data Pengembalian Kuesioner

Dari sebanyak 368 kuesioner yang dikirimkan/diunduh sebanyak 285 atau 77% dari total 100% Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan. Hanya Badan Publik yang mengembalikan kuesioner yang dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya, serta jumlahnya sesuai dengan kuota sesuai kategori yang kami tentukan di atas. Rinciannya sebagai berikut:

DATA PENGEMBALIAN KUESIONER (SAQ)

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019

No	Kategori Monev	Nama Badan Publik	Jumlah Pengiriman	Jumlah Pengembalian	Total Pengiriman	Total Pengembalian	Persentase Pengembalian
1	PPID UTAMA	PPID Utama	6	6	6	6	100%
2	PEMDA DIY	Pemda DIY	38	32	38	32	84%
3	OPD PEMKAB/PEMKOT SE-DIY	Pemkot Yogyakarta	33	28	157	137	87%
		Pemkab Sleman	30	30			
		Pemkab Bantul	36	32			
		Pemkab Kulon Progo	29	29			
		Pemkab Gunungkidul	29	18			
4	KECAMATAN	Kecamatan Yogyakarta	14	9	78	55	71%
		Kecamatan Sleman	17	17			
		Kecamatan Bantul	17	13			
		Kecamatan Kulon Progo	12	12			
		Kecamatan Gunungkidul	18	4			
5	YUDIKATIF	Yudikatif	20	16	20	16	80%
6	LEGISLATIF	Legislatif	6	5	6	5	83%

7	VERTIKAL	Vertikal	45	22	45	22	49%
8	BUMD	BUMD	18	12	18	12	67%
TOTAL					368	285	77%

Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) oleh KID DIY sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan), sedang badan publik yang mengembalikan berjumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) atau 77%.

5. Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian. Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY tahun 2019, kemudian menetapkan :

1) **Nominasi** untuk Kategori :

- a. PPID Utama Se-DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- b. OPD Pemerintah Daerah DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- c. Instansi Vertikal : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- d. Lembaga Yudikatif : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- e. OPD Pemda Kabupaten/Kota : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3,
Terbaik 4, Terbaik 5
- f. Kecamatan : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3
- g. BUMD Se-DIY : Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3

2) Penghargaan **Apresiasi** :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berkomitmen atas terbentuknya PPID Desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang telah berinovasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

5.1. Daftar Penerima Penghargaan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

A. Kategori: PPID Utama Pemerintah Daerah Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	82,50	TERBAIK 1
2	Pemerintah Kota Yogyakarta	80,89	TERBAIK 2
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	77,67	TERBAIK 3

B. Kategori: OPD Pemerintah Daerah DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	92,52	TERBAIK 1
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	87,34	TERBAIK 2
3	Badan Kepegawaian Daerah DIY	81,99	TERBAIK 3

C. Kategori: Instansi Vertikal

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY	90,89	TERBAIK 1
2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	88,06	TERBAIK 2
3	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY	78,33	TERBAIK 3

D. Kategori: Lembaga Yudikatif

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Pengadilan Agama Yogyakarta	83,79	TERBAIK 1
3	Pengadilan Agama Wates	77,49	TERBAIK 2
2	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	73,39	TERBAIK 3

E. Kategori: OPD Kabupaten/Kota Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kulon Progo	95,81	TERBAIK 1
2	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman	95,22	TERBAIK 2
3	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kab. Bantul	94,67	TERBAIK 3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo	89,73	TERBAIK 4
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman	88,65	TERBAIK 5

F. Kategori: Kecamatan Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Kecamatan Depok	84,15	TERBAIK 1
2	Kecamatan Nanggulan	83,18	TERBAIK 2
3	Kecamatan Pengasih	82,58	TERBAIK 3

G. Kategori: BUMD Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	PD BPR Bank Sleman	81,24	TERBAIK 1
2	PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kulonprogo	61,89	TERBAIK 2
3	PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	53,06	TERBAIK 3

H. Kategori: Legislatif Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	DPRD SLEMAN	57,00	TERBAIK 1
2	DPRD DIY	47,47	TERBAIK 2
3	DPRD BANTUL	41,67	TERBAIK 3

5.2. Daftar perolehan nilai dari tahapan kesatu sampai kelima Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

A. Kategori: PPID Utama Pemerintah Daerah Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Presentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	9,77	19,53	15,00	19,60	18,60	82,50
2	Pemerintah Kota Yogyakarta	9,81	28,53	9,75	16,80	16,00	80,89
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	9,14	22,05	10,88	18,60	17,00	77,67
4	Pemerintah Daerah DIY	7,83	34,65	15,00	18,00	0,00	75,48
5	Pemerintah Kabupaten Bantul	6,10	20,65	12,38	16,80	0,00	55,93
6	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	6,87	6,86	2,25	12,40	0,00	28,38

Note : Khusus untuk kategori PPID Utama, PPID Utama Pemda DIY tidak diperingkat hanya sampai tahapan Visitasi dikarenakan PPID Utama Pemda DIY sedang mengikut tahapan pemingkatan Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Pusat.

B. Kategori: OPD Pemerintah Daerah DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Presentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	9,12	36,05	14,25	16,70	16,40	92,52
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	9,99	24,15	15,00	19,60	18,60	87,34

3	Badan Kepegawaian Daerah DIY	9,76	28,81	11,63	17,80	14,00	81,99
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	9,66	29,40	15,00	13,80	0,00	67,86
5	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	7,72	33,08	3,75	12,00	0,00	56,55
6	Dinas Perhubungan DIY	4,29	30,98	3,75	7,40	0,00	46,41
7	Dinas Koperasi dan UKM DIY	8,51	22,75	7,50	0,00	0,00	38,76
8	Dinas Pariwisata Provinsi DIY	6,86	16,80	3,75	0,00	0,00	27,41
9	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda DIY	6,42	18,94	1,50	0,00	0,00	26,86
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	4,22	16,31	0,00	0,00	0,00	20,53
11	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	6,76	9,84	0,00	0,00	0,00	16,59
12	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Setda DIY	4,91	11,20	0,00	0,00	0,00	16,11
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6,49	9,49	0,00	0,00	0,00	15,97
14	Inspektorat Daerah DIY	6,64	9,10	0,00	0,00	0,00	15,74
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	8,17	6,30	0,00	0,00	0,00	14,47
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	5,96	7,56	0,00	0,00	0,00	13,52
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	8,36	3,92	0,00	0,00	0,00	12,28
18	Dinas Kesehatan DIY	9,83	2,03	0,00	0,00	0,00	11,86

19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	7,60	3,85	0,00	0,00	0,00	11,45
20	Badan Penghubung Daerah DIY	5,98	4,97	0,00	0,00	0,00	10,95
21	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	5,68	4,97	0,00	0,00	0,00	10,65
22	Dinas Kebudayaan DIY	7,23	2,45	0,00	0,00	0,00	9,68
23	Rumah Sakit Paru Respira	7,76	0,56	0,00	0,00	0,00	8,32
24	Dinas Sosial DIY	6,18	1,96	0,00	0,00	0,00	8,14
25	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	5,89	1,89	0,00	0,00	0,00	7,78
26	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	6,90	0,56	0,00	0,00	0,00	7,46
27	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	6,94	0,14	0,00	0,00	0,00	7,08
28	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Setda DIY	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
29	Biro Hukum, Setda DIY	6,28	0,42	0,00	0,00	0,00	6,70
30	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Setda DIY	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
31	Biro Bina Mental Spiritual, Setda DIY	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
32	Paniradya Keistimewaan DIY	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

C. Kategori: OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Presentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kulon Progo	9,93	31,68	15,00	19,60	19,60	95,81
2	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman	9,33	36,61	12,38	17,90	19,00	95,22
3	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kab. Bantul	8,72	36,75	15,00	15,20	19,00	94,67
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo	9,26	35,70	6,38	18,80	19,60	89,73
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman	9,90	29,93	11,63	19,20	18,00	88,65
6	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sleman	6,96	31,01	14,25	16,70	0,00	68,92
7	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo	7,78	35,00	7,88	18,00	0,00	68,65
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman	9,67	28,00	13,50	17,20	0,00	68,37
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul	5,83	31,33	15,00	15,40	0,00	67,56
10	Dinas Pendidikan Kab. Sleman	9,87	26,08	14,25	16,10	0,00	66,29
11	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta	8,21	31,85	9,00	0,00	0,00	49,06
12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Sleman	8,46	33,43	2,25	0,00	0,00	44,13
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	9,10	32,20	2,25	0,00	0,00	43,55
14	Dinas Kebudayaan Kab. Sleman	8,46	31,50	1,50	0,00	0,00	41,46

15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	7,49	30,80	2,25	0,00	0,00	40,54
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sleman	9,52	26,25	0,00	0,00	0,00	35,77
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman	9,19	26,43	0,00	0,00	0,00	35,61
18	Inspektorat Kota Yogyakarta	8,56	25,24	0,00	0,00	0,00	33,79
19	BPBD Kab. Kulon Progo	9,00	24,01	0,00	0,00	0,00	33,01
20	Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pendidikan Kota Yogyakarta	6,88	25,76	0,00	0,00	0,00	32,64
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Kulon Progo	6,61	25,62	0,00	0,00	0,00	32,23
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo	7,31	24,33	0,00	0,00	0,00	31,64
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman	7,32	24,15	0,00	0,00	0,00	31,47
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Sleman	7,29	23,63	0,00	0,00	0,00	30,91
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	9,90	20,30	0,00	0,00	0,00	30,20
26	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	8,69	21,39	0,00	0,00	0,00	30,07
27	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kab. Sleman	5,20	24,54	0,00	0,00	0,00	29,74
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bantul	5,78	23,10	0,00	0,00	0,00	28,88
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8,97	19,78	0,00	0,00	0,00	28,74

	Kab. Sleman						
30	Dinas Sosial Kab. Sleman	5,68	22,61	0,00	0,00	0,00	28,29
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	6,23	21,35	0,00	0,00	0,00	27,58
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sleman	9,98	17,50	0,00	0,00	0,00	27,48
33	Inspektorat Kab. Sleman	8,78	18,20	0,00	0,00	0,00	26,98
34	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman	7,57	18,76	0,00	0,00	0,00	26,33
35	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman	6,79	19,25	0,00	0,00	0,00	26,04
36	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kulon Progo	7,78	18,20	0,00	0,00	0,00	25,98
37	Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul	5,82	18,59	0,00	0,00	0,00	24,41
38	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	7,26	17,01	0,00	0,00	0,00	24,27
39	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo	9,50	14,39	0,00	0,00	0,00	23,89
40	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta	6,93	16,73	0,00	0,00	0,00	23,66
41	Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo	10,00	13,34	0,00	0,00	0,00	23,34
42	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	5,29	17,92	0,00	0,00	0,00	23,21
43	Dinas Koperasi Ukm Dan Perindustrian Kab. Bantul	7,08	15,61	0,00	0,00	0,00	22,69
44	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kulon Progo	5,80	16,84	0,00	0,00	0,00	22,64
45	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	5,13	17,36	0,00	0,00	0,00	22,49
46	Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo	4,78	17,01	0,00	0,00	0,00	21,79

47	Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul	5,84	14,56	0,00	0,00	0,00	20,40
48	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo	8,04	12,08	0,00	0,00	0,00	20,12
49	Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta	7,37	12,60	0,00	0,00	0,00	19,97
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Kb Kab. Kulon Progo	6,42	13,51	0,00	0,00	0,00	19,93
51	Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	6,13	13,65	0,00	0,00	0,00	19,78
52	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	6,46	12,99	0,00	0,00	0,00	19,44
53	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Kulon Progo	7,38	11,94	0,00	0,00	0,00	19,31
54	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta	9,90	9,31	0,00	0,00	0,00	19,21
55	Dinas Penanaman Modal Kab. Bantul	8,78	10,15	0,00	0,00	0,00	18,93
56	Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	3,22	15,23	0,00	0,00	0,00	18,45
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Gunungkidul	7,16	10,75	0,00	0,00	0,00	17,90
58	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman	7,68	9,49	0,00	0,00	0,00	17,16
59	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kesra Setda Kota Yogyakarta	5,61	10,92	0,00	0,00	0,00	16,53
60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul	4,91	11,41	0,00	0,00	0,00	16,32
61	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab.	6,81	8,58	0,00	0,00	0,00	15,39

	Kulon Progo						
62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Sleman	7,09	7,91	0,00	0,00	0,00	15,00
63	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo	6,53	8,30	0,00	0,00	0,00	14,83
64	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Kulon Progo	9,88	4,66	0,00	0,00	0,00	14,53
65	RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul	6,42	8,05	0,00	0,00	0,00	14,47
66	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman	7,88	6,48	0,00	0,00	0,00	14,35
67	Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo	5,76	8,44	0,00	0,00	0,00	14,19
68	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta	8,43	5,67	0,00	0,00	0,00	14,10
69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo	9,91	4,06	0,00	0,00	0,00	13,97
70	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
71	RSUD Kota Yogyakarta	8,59	5,25	0,00	0,00	0,00	13,84
72	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kulon Progo	9,92	3,64	0,00	0,00	0,00	13,56
73	Dinas Kebudayaan Kab. Bantul	6,07	7,42	0,00	0,00	0,00	13,49
74	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta	4,01	9,45	0,00	0,00	0,00	13,46
75	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Gunungkidul	8,39	4,76	0,00	0,00	0,00	13,15
76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bantul	3,77	9,35	0,00	0,00	0,00	13,11

77	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Sleman	7,84	4,76	0,00	0,00	0,00	12,60
78	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	8,36	3,92	0,00	0,00	0,00	12,28
79	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Gunungkidul	6,44	5,81	0,00	0,00	0,00	12,25
80	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	4,19	7,91	0,00	0,00	0,00	12,10
81	Dinas Kesehatan Kab. Sleman	6,21	5,81	0,00	0,00	0,00	12,02
82	RSUD Prambanan	8,97	3,05	0,00	0,00	0,00	12,01
83	Sekretariat Daerah Kab. Sleman	4,91	7,04	0,00	0,00	0,00	11,95
84	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	8,51	3,05	0,00	0,00	0,00	11,56
85	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Bantul	4,57	6,86	0,00	0,00	0,00	11,43
86	Dinas Pariwisata Kab. Sleman	8,47	2,94	0,00	0,00	0,00	11,41
87	Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman	9,37	2,03	0,00	0,00	0,00	11,40
88	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Gunungkidul	7,34	3,75	0,00	0,00	0,00	11,09
89	Dinas Pariwisata Kab. Bantul	6,86	4,06	0,00	0,00	0,00	10,92
90	Dinas Pertanian Dan Pangan Kab. Gunungkidul	6,81	3,92	0,00	0,00	0,00	10,73
91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	6,82	3,71	0,00	0,00	0,00	10,53

92	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Bantul	8,44	1,96	0,00	0,00	0,00	10,40
93	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	5,12	5,04	0,00	0,00	0,00	10,16
94	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Gunungkidul	7,99	2,17	0,00	0,00	0,00	10,16
95	RSUD Wates	6,46	3,68	0,00	0,00	0,00	10,13
96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta	6,20	3,92	0,00	0,00	0,00	10,12
97	Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo	6,76	3,22	0,00	0,00	0,00	9,98
98	Dinas Perdagangan Kab. Bantul	7,52	2,17	0,00	0,00	0,00	9,69
99	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman	8,41	1,26	0,00	0,00	0,00	9,67
100	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49
101	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	7,82	1,61	0,00	0,00	0,00	9,43
102	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Gunungkidul	3,89	5,53	0,00	0,00	0,00	9,42
103	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	5,94	3,33	0,00	0,00	0,00	9,27
104	Inspektorat Kab. Gunungkidul	6,63	2,31	0,00	0,00	0,00	8,94
105	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo	6,09	2,77	0,00	0,00	0,00	8,85
106	Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79
107	Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo	5,42	3,33	0,00	0,00	0,00	8,75
108	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	8,09	0,56	0,00	0,00	0,00	8,65
109	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dan Kerjasama Kota Yogyakarta	4,42	4,20	0,00	0,00	0,00	8,62

110	Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
111	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Bantul	6,12	1,96	0,00	0,00	0,00	8,08
112	Bagian Layanan Pengadaan Dan Jasa Setda Kab. Bantul	5,24	2,59	0,00	0,00	0,00	7,83
113	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta	6,36	1,26	0,00	0,00	0,00	7,62
114	Dinas Perhubungan Kab. Sleman	6,00	1,47	0,00	0,00	0,00	7,47
115	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul	5,80	1,61	0,00	0,00	0,00	7,41
116	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Kulon Progo	1,52	5,67	0,00	0,00	0,00	7,19
117	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Bantul	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
118	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul	6,76	0,28	0,00	0,00	0,00	7,04
119	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
120	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
121	RSUD Nyi Ageng Serang	6,27	0,28	0,00	0,00	0,00	6,55
122	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
123	Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
124	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul	5,12	1,19	0,00	0,00	0,00	6,31
125	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Gunungkidul	5,96	0,28	0,00	0,00	0,00	6,24
126	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13

127	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bantul	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
128	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
129	Inspektorat Daerah Kab. Bantul	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
130	Bagian Humas Protokol Pemkab Bantul	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
131	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	2,81	1,61	0,00	0,00	0,00	4,42
132	Balai Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
133	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Gunungkidul	2,57	1,04	0,00	0,00	0,00	3,60
134	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bantul	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
135	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
136	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
137	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13

D. Kategori: Instansi Vertikal

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY	9,89	36,75	14,25	16,00	14,00	90,89

2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta	8,69	30,98	15,00	18,40	15,00	88,06
3	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY	9,40	27,83	15,00	10,10	16,00	78,33
4	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Bantul	5,17	33,46	12,38	9,90	0,00	60,90
5	Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungung Kidul	4,17	23,63	15,00	15,80	0,00	58,59
6	Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul	5,21	23,63	12,38	8,10	0,00	49,31
7	Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo	3,59	14,88	12,38	0,00	0,00	30,84
8	Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY	7,79	7,74	15,00	0,00	0,00	30,52
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY	8,70	11,55	7,88	0,00	0,00	28,13
10	Kanwil BPN DIY	5,09	9,63	0,00	0,00	0,00	14,71
11	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta	8,46	2,03	0,00	0,00	0,00	10,49
12	Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Prov DIY	7,54	2,45	0,00	0,00	0,00	9,99
13	Kepolisian Daerah (POLDA) DIY	5,91	4,06	0,00	0,00	0,00	9,97
14	Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIY	4,89	2,87	0,00	0,00	0,00	7,76
15	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta	5,34	2,31	0,00	0,00	0,00	7,65
16	Kementrian Agama (KEMENAG) Gunungkidul	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27

17	Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Yogyakarta	6,39	0,70	0,00	0,00	0,00	7,09
18	Kementrian Agama (KEMENAG) Sleman	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
19	Komando Resort Militer (KOREM) 072 Pamungkas	4,90	0,98	0,00	0,00	0,00	5,88
20	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Kulonprogo	4,16	0,42	0,00	0,00	0,00	4,58
21	Kepolisian Resor (POLRES) Kulonprogo	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
22	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kota Yogyakarta	3,57	0,42	0,00	0,00	0,00	3,99

E. Kategori: Lembaga Yudikatif

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Pengadilan Agama Yogyakarta	7,34	35,35	15,00	13,90	12,20	83,79
3	Pengadilan Agama Wates	9,90	33,99	3,00	18,60	12,00	77,49
2	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	7,77	18,03	15,00	18,60	14,00	73,39
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	6,10	23,45	9,75	19,20	0,00	58,50
5	Pengadilan Agama Sleman	6,41	33,95	5,25	12,80	0,00	58,41
6	Pengadilan Negeri Yogyakarta	9,60	23,10	6,00	18,40	0,00	57,10
7	Pengadilan Agama Bantul	6,47	27,48	4,50	0,00	0,00	38,44

8	Pengadilan Negeri Wonosari	7,61	24,85	3,75	0,00	0,00	36,21
9	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	4,22	26,81	4,50	0,00	0,00	35,53
10	Pengadilan Negeri Sleman	7,08	15,05	0,00	0,00	0,00	22,13
11	Pengadilan Negeri Wates	7,19	10,15	0,00	0,00	0,00	17,34
12	Kejaksaan Negeri Sleman	5,56	8,40	0,00	0,00	0,00	13,96
13	Kejaksaan Tinggi DIY	6,10	7,70	0,00	0,00	0,00	13,80
14	Pengadilan Negeri Bantul	6,96	6,65	0,00	0,00	0,00	13,61
15	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	7,52	5,60	0,00	0,00	0,00	13,12
16	Kejaksaan Negeri Bantul	5,92	5,99	0,00	0,00	0,00	11,91

F. Kategori: Kecamatan Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	Kecamatan Depok	10,00	29,05	13,50	17,60	14,00	84,15
2	Kecamatan Nanggulan	4,16	34,13	13,50	15,40	16,00	83,18
3	Kecamatan Pengasih	8,68	30,80	13,50	19,60	10,00	82,58
4	Kecamatan Girimulyo	6,44	25,20	12,75	19,20	0,00	63,59
5	Kecamatan Samigaluh	6,52	29,96	9,38	15,00	0,00	60,86

6	Kecamatan Sentolo	6,10	28,88	9,38	8,10	0,00	52,45
7	Kecamatan Wates	8,09	22,96	13,13	0,00	0,00	44,17
8	Kecamatan Ngemplak	8,10	20,69	15,00	0,00	0,00	43,79
9	Kecamatan Lendah	7,43	32,38	3,75	0,00	0,00	43,56
10	Kecamatan Mlati	3,16	23,45	0,00	0,00	0,00	26,61
11	Kecamatan Jetis	9,99	15,96	0,00	0,00	0,00	25,95
12	Kecamatan Moyudan	5,42	20,48	0,00	0,00	0,00	25,90
13	Kecamatan Bantul	4,62	21,21	0,00	0,00	0,00	25,83
14	Kecamatan Danurejan	2,93	20,86	0,00	0,00	0,00	23,79
15	Kecamatan Panjatan	7,82	14,74	0,00	0,00	0,00	22,56
16	Kecamatan Galur	5,81	15,30	0,00	0,00	0,00	21,11
17	Kecamatan Pakem	3,37	16,80	0,00	0,00	0,00	20,17
18	Kecamatan Gondomanan	7,91	12,11	0,00	0,00	0,00	20,02
19	Kecamatan Pakualaman	9,57	9,10	0,00	0,00	0,00	18,67
20	Kecamatan Umbulharjo	7,70	9,66	0,00	0,00	0,00	17,36
21	Kecamatan Srandakan	9,64	7,56	0,00	0,00	0,00	17,20

22	Kecamatan Mantrijeron	4,33	11,20	0,00	0,00	0,00	15,53
23	Kecamatan Gamping	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	14,70
24	Kecamatan Minggir	3,67	10,68	0,00	0,00	0,00	14,34
25	Kecamatan Kalasan	10,00	4,06	0,00	0,00	0,00	14,06
26	Kecamatan Ngaglik	6,16	6,86	0,00	0,00	0,00	13,02
27	Kecamatan Berbah	7,78	4,41	0,00	0,00	0,00	12,19
28	Kecamatan Temon	6,34	5,53	0,00	0,00	0,00	11,87
29	Kecamatan Prambanan	7,63	3,15	0,00	0,00	0,00	10,78
30	Kecamatan Kalibawang	7,58	3,08	0,00	0,00	0,00	10,66
31	Kecamatan Kraton	7,91	2,03	0,00	0,00	0,00	9,94
32	Kecamatan Mergangsan	7,49	2,45	0,00	0,00	0,00	9,94
33	Kecamatan Godean	6,68	3,15	0,00	0,00	0,00	9,83
34	Kecamatan Tempel	7,50	1,93	0,00	0,00	0,00	9,43
35	Kecamatan Kokap	6,38	3,01	0,00	0,00	0,00	9,39
36	Kecamatan Cangkringan	8,81	0,56	0,00	0,00	0,00	9,37
37	Kecamatan Kretek	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31

38	Kecamatan Seyegan	6,10	2,31	0,00	0,00	0,00	8,41
39	Kecamatan Sanden	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
40	Kecamatan Sleman	5,88	2,17	0,00	0,00	0,00	8,05
41	Kecamatan Ngampilan	7,40	0,56	0,00	0,00	0,00	7,96
42	Kecamatan Piyungan	4,64	2,91	0,00	0,00	0,00	7,55
43	Kecamatan Pleret	4,22	2,91	0,00	0,00	0,00	7,13
44	Kecamatan Sewon	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
45	Kecamatan Purwosari	4,97	1,68	0,00	0,00	0,00	6,65
46	Kecamatan Pandak	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
47	Kecamatan Tepus	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
48	Kecamatan Kasihan	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
49	Kecamatan Girisubo	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
50	Kecamatan Bambanglipuro	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
51	Kecamatan Sedayu	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
52	Kecamatan Turi	1,54	2,31	0,00	0,00	0,00	3,85
53	Kecamatan Tanjungsari	2,57	0,84	0,00	0,00	0,00	3,41

54	Kecamatan Jetis	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
55	Kecamatan Pundong	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13

G. Kategori: BUMD Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	PD BPR Bank Sleman	9,54	21,70	15,00	18,80	16,20	81,24
2	PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kulonprogo	6,69	22,75	2,25	15,80	14,40	61,89
3	PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	5,16	20,65	5,25	11,00	11,00	53,06
4	PD. Aneka Usaha Kab. Kulon Progo	3,13	4,55	11,25	16,20	0,00	35,13
5	Bank Jogja Kota Yogyakarta	6,94	3,50	10,13	12,00	0,00	32,57
6	PT Selo Adi Karto (SAK) Kab. Kulon Progo	5,26	4,55	7,88	3,50	0,00	21,18
7	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) DIY	4,92	7,70	3,75	0,00	0,00	16,37
8	PDAM Tirta Handayani Kab. Gunungkidul	4,88	2,80	3,75	0,00	0,00	11,43
9	PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta	6,91	1,05	2,25	0,00	0,00	10,21
10	PD Jogjatama Vishesa	5,98	1,40	0,00	0,00	0,00	7,38
11	PD BPR Bank Bantul	6,78	0,35	0,00	0,00	0,00	7,13
12	PDAM Tirta Binangun Kab. Kulon Progo	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46

H. Kategori: Legislatif Se-DIY

No	Nama Badan Publik	Tahapan Penilaian					Total Nilai
		SAQ	Website	Uji Akses	Visitasi	Persentasi	
		10%	35%	15%	20%	20%	
1	DPRD SLEMAN	8,14	9,31	9,75	13,80	16,00	57,00
2	DPRD DIY	6,50	4,97	13,50	12,90	9,60	47,47
3	DPRD BANTUL	7,72	0,00	9,75	11,80	12,40	41,67
4	DPRD KULON PROGO	5,78	0,00	7,50	0,00	0,00	13,28
5	DPRD GUNUNGGKIDUL	3,93	0,42	2,25	0,00	0,00	6,60

6. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Tim Monev mendapatkan beberapa catatan, antara lain:

a. Kondisi Umum:

Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan. Bahkan Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit yang membuat ringkasan akses informasi publik.

b. Catatan Khusus

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

1. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
2. Pemahaman atas UU KIP masih perlu ditingkatkan karena mayoritas petugas PLID tidak tahu UU KIP dan Perki.
3. Masih ada kerancuan dalam memahami frase “informasi publik” sebagaimana dimaksud pada UU KIP dan informasi publik yang terkait dengan layanan *core business*
4. Belum tersedianya ruang khusus untuk PPID.
5. Belum tersedia komputer khusus bagi para pemohon untuk mengakses sendiri informasi publik yang dimaksud.
6. Masih ada Badan Publik yang tidak mempunyai Formulir Permohonan Informasi di meja layanan informasi.
7. Tidak adanya alur atau petunjuk yang jelas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
8. Perlu adanya pemisahan yang jelas antara PPID Utama dengan Diskominfo karena cakupan PPID Utama lebih luas agar tidak tumpang tindih tugas dan fungsi.
9. Bagan Struktur Organisasi yang disediakan PPID Utama berupa bagan struktur organisasi PPID, padahal mestinya PPID utama sebagai pengelola informasi publik Pemerintah Daerah, yang disediakan berupa Struktur Organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
10. Masih sangat sedikit Badan Publik yang menyediakan informasi serta merta, yang berupa informasi kedaruratan di lokasi Badan Publik, seperti petunjuk arah evakuasi, titik kumpul dsb.

c. Nilai Pembelajaran:

Selama proses monitoring dan evaluasi, khususnya saat dilakukan visitasi, terdapat pembelajaran yang dapat diambil nilainya untuk ditularkan ke Badan Publik lainnya antara lain:

1. Kreativitas PPID melakukan rekap setiap akhir bulan secara rutin atas buku register layanan informasi publik dan ditandatangani PPID. Bahkan Pimpinan Badan Publik juga secara rutin melakukan supervisi terhadap pengelolaan dokumen yang dilakukan PPID;

2. Perlu peningkatan pemahaman mengenai UU KIP dan peraturan pelaksanaannya di Level PPID dan PLID.
3. Perlu ruangan khusus untuk layanan informasi yang terintegrasi dengan berbagai bidang dan Komputer khusus untuk layanan informasi.
4. Perlu dibuat sistem pendokumentasian yang merujuk pada UU KIP meskipun tempat penyimpanan dokumen menyatu dengan dokumen layanan lainnya.
5. Badan Publik perlu memberikan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan mengakses layanan Badan Publik, sehingga memudahkan masyarakat.

7. Penutup

Selamat kepada pemenang. Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Dan bagi yang belum menjadi pemenang, semoga tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan selama ini di lembaga masing-masing. Kami haturkan terima kasih juga kepada Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) beserta para Penelitinya, Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Para Pimpinan Badan Publik di DIY, serta semua pihak yang telah mendukung monitoring dan evaluasi ini. Kami berharap monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 01 Oktober 2019

Ketua
Komisi Informasi Daerah DIY



(Hazwan Iskandar Jaya, SP)